



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIRZA AGUS
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 804812

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.461.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.151.000.000
2. Tanah Seluas 7606 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 342.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SPD. MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA H STAR A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 348.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 110.723.066**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.262.223.066**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.262.223.066**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.